

**MENELISIK KONFLIK JEMAAT GPM ELAAR-LAMAGORANG,
KLASIS GPM PULAU-PULAU KEI KECIL**

Alberth Akollo
Lembaga Pembinaan Jemaat GPM
alberth20@gmail.com

Abstract

Maintaining the integrity of the congregation is a duty of the church's calling in carrying out God's mission (Missio Dei). Empirical reality shows that the integrity of the congregation is undermined by the different interests of each person in the church, so that divisions are prone to occur because the conflicts caused by interests that cannot be fulfilled. This is what happened in the Elaar Lamagorang's Congregation of Protestant Church of Maluku (GPM), in the the Kei Kecil Islands Classis' of GPM. The disagreements that arise between the two groups create divisions which result disharmony among the church members. The method used to describe this paper is a narrative method assisted by Pruitt and Rubin's conflict of theories to explain the conflict events that occurred among them.

Keywords: *Conflict, Elaar Lamagorang's Congregation, Division, Disharmony.*

Abstrak

Menjaga keutuhan jemaat merupakan suatu tugas panggilan gereja dalam menjalankan misi Allah (*Missio Dei*). Realitas empiris menunjukkan bahwa keutuhan jemaat digerogeti oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda dari setiap orang dalam jemaat, sehingga perpecahan rentan terjadi karena konflik yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang tidak dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana terjadi di Jemaat GPM Elaar Lamagorang, Klasis GPM Pulau-pulau Kei Kecil. Di mana ketidaksepakatan yang muncul di kalangan dua kelompok membuat terjadi perpecahan yang berakibat pada ketidakharmonisan antarjemaat. Metode yang digunakan untuk menguraikan tulisan ini adalah metode naratif yang dibantu dengan teori konflik Pruitt dan Rubin untuk menjelaskan tentang peristiwa konflik yang terjadi di kalangan mereka.

Kata Kunci: *Konflik, Jemaat GPM Elaar Lamagorang, perpecahan, ketidakharmonisan.*

PENDAHULUAN

Situasi Jemaat GPM Elaar Lamagorang, Klasis GPM Pulau-pulau Kei Kecil, mengalami perubahan dibandingkan keberadaan saya di sana sebelum menjadi vikaris Gereja Protestan Maluku (GPM) di Jemaat GPM Elaar, tahun 2019. Puing-puing reruntuhan rumah warga yang sempat diluluhlantakan oleh amukan kelompok perusuh hampir tidak terlihat lagi. Dibandingkan pengalaman saya sebelumnya, sewaktu menjadi mahasiswa KKN UKIM di awal bulan Maret, tahun 2012 yang silam.

Hanya sedikit yang mengetahui tentang jemaat kecil di selatan pulau Kei kecil ini. Satu-satunya jemaat/desa yang paling cepat pulih dari konflik sosial, 1999, bila dibandingkan daerah lain di seluruh pulau kei (kei kecil maupun kecil besar) bahkan di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. Jemaat GPM Elaar merupakan satu dari enam belas jemaat di wilayah pelayanan Klasis Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual. Secara administratif daerah, Jemaat ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dengan luas wilayah $\pm 5,26$ meter persegi.

Sebagai tempat dicetuskannya hukum Larvul Ngabal, yaitu hukum adat yang mengatur norma etik-sosial seluruh kehidupan masyarakat suku Kei, menjadikan tempat ini sangat eksotis. Jemaat yang secara adat berjulukan “Talyoar Naraha: bintang siang” itu, sedang bergerak dalam pertumbuhan iman, spiritualitas, ekonomi dan pendidikan. Bahkan sepanjang tahun 2017-2018, sempat terselenggara event bertaraf Daerah dan Nasional dengan menghadirkan sejumlah pejabat daerah Kabupaten, propinsi dan kementerian, yaitu event festival “Meti Kei”. Sedangkan baru-baru ini, untuk pertama kalinya (pasca konflik 1999) mereka boleh menyaksikan momen bersejarah, peresmian Gedung Gereja Baru; Wai Tu’tung. Pada dasarnya, agenda-agenda tersebut hendak menunjukkan bahwa “yang lama biarlah berlalu dan yang baru telah datang”. Yang baru adalah suatu naluri kemanusiaan untuk membangun kembali tatanan kehidupan bermasyarakat yang sempat tak berdaya menghadapi arogansi agama.

Hanya saja dalam praktiknya, ada satu hal yang mempengaruhi masa depan masyarakat Elaar dari sisi pemerintahan desa maupun gereja, yaitu konflik internal antar masyarakat Elaar Lamagorang, yang terjadi sejak tahun 2006. Maka dalam tulisan ini saya akan menguraikannya lebih jauh dan membatasinya hanya pada dampaknya terhadap kepentingan pelayanan gereja.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan menjelaskan konflik internal di Jemaat GPM Elaar dari sisi karakteristiknya, saya menggunakan lensa teori konflik dari Pruitt dan Rubin. Menurut Pruitt dan Rubin, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Sedangkan kepentingan itu sendiri adalah perasaan orang mengenai apa sesungguhnya yang ia inginkan. Dan perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Selanjutnya, sebelum kepentingan-kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan Pihak Lain, kepentingan-kepentingan tersebut diterjemahkan ke dalam suatu *aspirasi* yang di dalamnya terkandung tujuan dan standar. Tujuan adalah akhir yang lebih kurang, tepat dari arah yang diperjuangkan oleh seseorang. *Standar* adalah tingkat pencapaian minimal yang bila lebih rendah daripadanya orang akan menganggapnya tidak memadai. Semakin besar ketidaksesuaian yang ada, maka semakin besar pula kepentingan itu dipersepsi.¹

Sedangkan menurut karakteristiknya, konflik dapat dibagi kedalam bagian-bagian tertentu yaitu: konflik nilai (*value-based conflict*), konflik kepentingan (*interest-based conflict*), konflik struktural (*structural conflict*), konflik hubungan (*relationship conflict*) dan terakhir konflik data (*date conflict*)². Lalu menurut strategi penyelesaian konflik dapat disebutkan ada beberapa, yakni: strategi *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *with drawing* (menarik diri) dan terakhir *inaction* (diam).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Jalan Panjang Berlekuk**

Sejak tahun 2000, setelah kembalinya warga Jemaat GPM Elaar dari tempat pengungsian sembari membangun kembali kehidupan mereka dari keterpurukan, terjadilah sebuah konflik yang sangat memprihatinkan yaitu pada tahun 2006. Kali ini yang mereka hadapi adalah kelompok di dalam diri mereka sendiri. Diketahui bahwa konflik itu berhubungan dengan masalah perkawinan muda-mudi yang tidak direstui oleh pihak keluarga pria dengan alasan tertentu. Sudah pasti sikap ini bukanlah hal yang diinginkan. Mereka dari

¹ Dean G. Pruitt, dkk, "*Teori Konflik Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 21-22.

² Alberth Akollo, [*Peranan Gereja Ditenqah Konflik dua Komunitas Pemuda Batu Gantung Dalam dan Pemuda Batu Gantung Ganemo di Jemaat GPM Rehoboth*](#) Tesis Program studi Sosiologi Agama Uksw, 2015, 15,16,18

pihak perempuan menganggap keputusan yang diambil oleh keluarga besar pihak laki-laki untuk membatalkan perkawinan mereka merupakan hal yang tidak benar dan cenderung diskriminatif. Akibatnya perselisihan atau konflik tidak terelekan. Dengan sekejap saja intensitas dan skala konfliknya menjadi besar dan tak terkendali.

Buntut dari konflik tersebut, pihak yang merasa dirugikan itu mengeluarkan surat pernyataan sikap bersama, lalu dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah dan gereja. Pernyataan sikap yang dimaksudkan itu pada intinya menyatakan bahwa mereka sudah bukan lagi bagian yang utuh dalam tatanan masyarakat, adat dan jemaat yang lama. Sebagai bukti atas kesungguhan itu, mereka merobohkan rumah mereka dan memilih menetap di dusun-dusun mereka yang berada tidak jauh dari tempat awal mereka berada. Di kemudian hari mereka menamakan tempat yang baru mereka tempati itu dengan nama *Udviseruk* atau dengan nama lain yaitu Elaar Kampung Baru.

Semenjak kejadian itu terjadi, pemimpin gereja tampil di depan untuk menengahi dan membantu mencairkan suasana yang benar-benar mencekam. Caranya yaitu dengan mendatangi mereka secara langsung dan mengajak mereka untuk kembali. Namun, upaya mereka sia-sia. Sempat juga dilakukan pelayanan ibadah bagi mereka ini, tetapi tidak berlangsung lama, karena mereka terus melakukan penolakan terhadap unsur-unsur yang berbau Elaar. Karena tidak ada kemajuan apapun, maka secara institusi Majelis Jemaat GPM Elaar mengambil kebijakan meniadakan seluruh pelayanan gereja kepada mereka untuk sementara waktu.

Sebaliknya pihak *udviseruk* mengambil inisiatif atas sikap Majelis Jemaat tersebut dengan memilih dan mengangkat tujuh orang dari antara mereka untuk dijadikan koordinator. Yang bertanggungjawab atas pemberitaan Injil dan peribadahan. Mereka bertugas menyiapkan kebaktian Minggu bagi umat dan memimpin kebaktian, serta bertanggungjawab atas pertumbuhan iman umat dengan melakukan proses-proses pembinaan. Ketujuh orang koordinator ini menjalankan fungsi sebagai pelayan khusus gereja. Selain itu, diangkat pula tuagama dan kolektan dengan maksud untuk melengkapi kebutuhan pelayanan dan dibentuknya unit-unit pelayanan dan kepemudaan sebagai strategi pembinaan umat.

Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan bahwa *udviseruk* selama ini melihat diri mereka sebagai warga jemaat GPM dan memperlakukan komunitas mereka seperti sebuah jemaat dengan mengadopsi ciri-ciri pelayanan GPM. Mulai dari busana liturgi yang digunakan oleh ketujuh koordinator, nyanyian jemaat, tahun liturgi gereja serta materi-materi khotbah dan

materi pembinaan, semuanya mengikuti pola dan ketentuan GPM. Bahkan mereka telah memiliki sebuah gedung gereja permanen yang indah dengan halaman yang cukup luas.

Baru pada tahun 2016 yaitu setelah intensitas konflik mulai reda dimulai upaya-upaya konkrit untuk menyudahi perselisihan. Secara kelembagaan, gereja telah mengambil peran yang cukup signifikan untuk mengatasi gejala yang ada. Hal itu dapat dilihat pada hasil keputusan ke-XVII Persidangan Jemaat GPM Elaar yang tertuang dalam poin rekomendasi persidangan Jemaat seksi PPK butir 2.3: yang menyatakan bahwa: Sidang memerintahkan kepada Majelis Jemaat GPM Elaar agar melakukan kerja sama dengan pemerintah Ohoi, Badan Saniri Ohoi (BSO), tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala marga agar menyikapi masalah-masalah keluarga yang terjadi dalam jemaat dan Ohoi". Kemudian pada persidangan Jemaat ke-XVIII tahun 2017 dikeluarkan kembali rekomendasi yang sama yang tertuang dalam butir 3.2 seksi PPK, yang berbunyi "mengundang kembali pemerintah Ohoi, BSO, tokoh masyarakat dan kepala-kepala marga untuk membahas kelanjutan masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat dan Ohoi". Dan terakhir dalam persidangan jemaat ke-IX pada poin rekomendasi butir 1.2, seksi PIPK yang berbunyi "Majelis Jemaat segera menentukan langkah-langkah untuk memediasi percepatan proses rekonsiliasi dengan keluarga besar Elaar kampung baru dengan Desa induk. Perlu ditambahkan, dalam beberapa kali persidangan tersebut, pihak *udviseruk* turut diundang hadir.

Meskipun gereja telah menunjukkan keseriusan dalam mengakhiri seluruh pertikaian yang ada, namun keputusan-keputusan tersebut tidak pernah dijalankan secara serius. Maka pertanyaannya, mengapa demikian? Patut diduga bahwa keputusan persidangan yang adalah pengambilan keputusan tertinggi di level jemaat itu dibuat tidak cermat dan gegabah. Buktinya, pada setiap redaksi kalimat rekomendasi hasil persidangan jemaat, tidak secara spesifik disebutkan persoalan apa atau persoalan mana dari antara persoalan yang ada yang harus mendapat perhatian dalam keputusan tersebut. Sebab pada kenyataannya, ada persoalan lain yang juga menyita konsentrasi pihak majelis jemaat yaitu pada persoalan mengenai rencana memperingati sejarah Injil masuk di Jemaat Elaar. Rencana ini mengalami hambatan karena ternyata ada perbedaan versi sejarah yang hingga kini belum tuntas. Hal yang lebih menentukan lagi ialah bahwa, sebagian dari keturunan pelaku sejarah merupakan warga dari komunitas *udviseruk*. Karena itu, pelaksanaan event ini hanya dapat terjadi apabila dua belah pihak telah berdamai.

Dalam pelaksanaanya, usaha penyelesaian masalah internal di Jemaat/Desa Elaar Lamagorang ini juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara. Namun proses tersebut tidaklah berjalan baik, sehingga persoalan ini kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah desa Elaar Lamagorang. Pemerintah Desa Elaar Lamagorang pun telah melakukan serangkaian pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil keputusan dari setiap rapat yang dilaksanakan itu disampaikan kepada pihak *udviseruk* melalui delegasi.

Terakhir pertemuan tanggal 3 Agustus 2019, atas inisiatif Majelis Pekerja Klasis Kei Kecil dan Kota Tual dilakukanlah pertemuan bersama yang dihadiri oleh Majelis Jemaat GPM Elaar, Pemerintah Desa Elaar Lamagorang dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pertemuan itu dilaksanakan berdasarkan hasil persidangan klasis Kei Kecil dan Kota Tual baru-baru ini di Jemaat GPM Ur Pulau. Pertemuan yang dilaksanakan bersama para stakeholder itu menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Elaar Lamagorang siap berdamai dengan catatan, jika Elaar Kampung Baru bersedia menarik kembali surat sikap pernyataan mereka³. *Kedua*, Penggunaan nama Elaar untuk *Udviseruk* (sedianya nama *Udviseruk* digunakan dalam kepentingan administrasi di Klasis dan dalam penyebutan lain).

Langkah-langkah pimpinan klasis tersebut di atas patut diapresiasi. Karena sepanjang ketegangan ini berlangsung baru kali itu pihak klasis mengadakan pertemuan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam skala yang cukup besar. Hal ini juga menandakan bahwa posisi klasis menjadi sangat penting sebagai pihak mediator yang dianggap netral. Berbeda ketika tanggungjawab itu dilakukan oleh Majelis Jemaat Elaar.

Dari hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh Klasis Kei Kecil dan Kota Tual diperoleh informasi lain. Kedua belah pihak yang bertikai akan berdamai apabila masing-masing menerima tanpa syarat seluruh syarat-syarat yang ditetapkan. Pihak *udviseruk* menginginkan perdamaian tetapi menghendaki tuntutan mereka dipenuhi. Salah satu tuntutan yang menjadi syarat dilakukannya perdamaian yaitu agar mereka di jadikan satu jemaat mandiri terpisah dari jemaat induk. Di sisi lain, pihak Elaar Lamagorang menghendaki pihak

³ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bpk S.L mengungkapkan, “surat pernyataan sikap” yang dimaksudkan itu berisi pernyataan sikap keluar dari Desa, Jemaat, dan Adat. Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh sejumlah pihak dan disampaikan kepada institusi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta gereja dalam hal ini klasis kei kecil dan kota tual. Dari isi surat itu, ada sejumlah masalah yang ikut melatarbelakangi tindakan mereka ini. Artinya, masalah tersebut adalah fenomena gunung es. Ada lapisan yang tidak kelihatan namun sangat mempengaruhi.

udviseruk agar mereka bersedia menarik kembali surat pernyataan yang pernah mereka buat sebelumnya. Dan berharap mereka (*udviseruk*) mau bergabung kembali sebagai satu kesatuan masyarakat Elaar Lamagorang seperti sedia kala lagi.

Berdasarkan lensa di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konflik antar umat di Jemaat GPM Elaar memiliki karakteristik yang cukup luas dengan melibatkan dua institusi yang berbeda: agama (gereja) dan pemerintah. Dalam penyelesaiannya masing-masing pihak menerapkan strategi *contending* di mana pihak-pihak yang sedang bertikai kedapatan memegang teguh aspirasi dan saling mempengaruhi. Pihak *udviseruk* menginginkan suatu “jemaat mandiri” yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak suara mayoritas umat di Elaar.

Sejak konflik itu berlangsung, benar-benar telah mempengaruhi banyak sekali dimensi pelayanan gereja. Meskipun gereja sebagai institusi pada Aras Jemaat dan Klasik telah mengambil peran yang cukup signifikan, namun ternyata hasilnya kurang menggembirakan. Sebab, segala bentuk penyelesaian yang diambil adalah suatu kesepakatan bersama dengan pemerintah setempat. Terhadap hal itu dugaan saya ialah ada semacam pemahaman masyarakat yang cenderung menyamakan gereja dan negara/pemerintah. Padahal keduanya adalah institusi berbeda. Itulah alasan mengapa gereja “tidak” menggunakan instrumennya untuk menyelesaikan masalah dimaksud.

Menjaga Kesatuan Jemaat: Catatan Refleksi

John Ruhulesin mengemukakan, konteks kehidupan sosial di Indonesia sejak awal merupakan suatu ruang publik yang plural dalam bidang agama, etnis dan sub-etnis. Pluralisme merupakan fakta masyarakat yang harus diakui dan diterima sebagai sesuatu yang eksistensial,⁴ apa adanya. Lanjutnya, persoalannya adalah bagaimana kehidupan bersama bisa dibangun dalam kehidupan publik yang riil? Sebab ternyata seseorang sebagai individu adalah juga anggota dari suatu kelompok agama yang memiliki standar-standar moral, sistem nilai partikular⁵. Dalam situasi seperti itu, tuntutan untuk membangun kehidupan bersama tidak jarang menimbulkan konflik bahkan pertentangan-pertentangan nilai.

⁴ Jhon Chr. Ruhulesin, “Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku”, (Salatiga: Program Pascasarjana, Program Studi Doktor Sosiologi Agama), 12

⁵ *Ibid*, 12

Dalam perpektif teologi, proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya di bumi Evav (Kei) tidak bisa dilepaskan dari aspek agama-agama. Itu berarti pesan kemanusiaan yang melekat pada agama-agama serta pengakuan akan manusia sebagai ciptaan Tuhan harus menjadi dasar berteologi. Dalam kerangka itu, perspektif keadilan dan persekutuan yang di dalamnya mengandung konsep egaliter, persaudaraan dan kemerdekaan merupakan refleksi diri menjadi perekat hubungan agama-agama dengan wawasan kebangsaan. Dalam perspektif seperti itu, agama-agama (GPM) pada berbagai level, berdiri sebagai pihak yang memberi inspirasi dan sekaligus kritik profetis bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada penjelasan terdahulu, telah dikemukakan bahwa masyarakat Kei mengenal filosofi *ain ni ain*. Gagasan ini mengandung nilai egaliter atau kesetaraan dalam hubungan yang lebih luas. Seperti hubungan antara individu dengan individu yang berbeda, agama dengan agama yang berbeda. olehnya, ia juga memiliki kekuatan atau daya dorong pada basis sosiologis. Artinya konsep *ain ni ain* memiliki fungsi sebagai alat negosiasi. Usaha mengembangkan teologi yang egaliter mutlak diperlukan. Dalam kotenteks tulisan ini, pengembangan teologi yang egaliter dimaksudkan semata-mata untuk menjawab dinamika pelayanan di GPM dan secara khusus di Jemaat Elaar. Dalam rangka itulah pada bagian ini, saya akan berefleksi dari konteks Jemaat Elaar dengan mengambil Jemaat Korintus sebagai informasi pembanding. Mengapa Korintus? Sebab ternyata, dari penelusuran gambaran umum tentang Jemaat Kristen di Korintus, menunjukkan bahwa ada kesamaan yang cukup prinsipil dengan kenyataan sosial-keagamaan di Jemaat Elaar. Yang menunjukkan perselisihan hebat hingga terjadinya pengerasan identitas.

Dalam studi Perjanjian Baru (PB) ditemukan alasan yang melatarbelakangi mengapa Paulus harus menulis suratnya kepada Jemaat di Korintus. Yaitu dengan maksud menanggapi sejumlah “skandal politik” di Korintus. Diantaranya yaitu mengenai kasus pelanggaran susila, kasus pemakaian pengadilan sipil untuk menyelesaikan perkara hukum, masalah penyembahan daging sebagai korban kepada berhala, masalah pernikahan, selibat dst.⁶ Mengapa skandal politik ketimbang aspek religiositasnya? Ini merupakan pertanyaan yang cukup menarik. Pada hasil analisis Pfitzner dan Welborn terhadap kondisi sosio-historis kehidupan Jemaat di Korintus, menyimpulkan bahwa persoalan mendasar disana lebih kepada persoalan politik.

⁶ Willi Marxen, “*Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya*”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 80.

Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut yaitu penggunaan kata yunani [οχισμοι](#): (inggris: division) “perpecahan”, muncul dalam 1 Korintus 1:10 yang merujuk pada pergolakan kekuasaan. Dan Ερις: (inggris: strife) “perselisihan” muncul dalam 1 Kor 1:11; 3:3. Menurut Welborn kata itu (Ερις) adalah kata yang mengandung nuansa politis karena sering muncul dalam masa krisis sosial dan politis⁷.

Reaksi Paulus terhadap sejumlah skandal politis di atas merupakan puncak kekhawatirannya dalam membendung meluasnya berbagai aliran pemikiran yang bertumbuh subur di Korintus. Terutama yang dibawa oleh pengagum gnosis dan kelompok Kristen lain di Korintus (yang masih melekat pada guru-guru mereka).⁸ Secara tegas Paulus menyebutkan kelompok ini dengan istilah “manusia duniawi” (1 Kor. 2:14). Kendati Paulus bereaksi sangat keras dalam menanggapi pengaruh kelompok pengagum gnosis, ia pun tidak ingin berlarut-larut dalam perdebatan politis tersebut. Sebaliknya Paulus merangkul (dalam bahasa Homi Bahbha: bernegosiasi) dengan kelompok tersebut. Caranya dengan menanamkan sebuah pemahaman teologi yang ditunjukkan melalui frasa “Banyak Anggota Tetapi Satu Tubuh”, “Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan” 1 Korintus 3:6. Analogi tubuh bagi umat kudus di Korintus bermakna bahwa tidak ada satu anggota tubuh yang tidak tergantung dari anggota tubuh yang lain. Karena itu, mereka saling membutuhkan, maka diantara mereka harus saling menghargai, saling mendukung dan menghormati perbedaan yang ada. Begitu pula analogi *menanam dan menyiram* yang diambil dari dunia pertanian. Anologi ini hendak menunjukkan bahwa kekuatan injil bukan terletak pada pengetahuan manusia, melainkan pada kemampuan penghayatan iman dan dalam kekuatan Roh Kudus.

Maka disinilah hebatnya Paulus dalam mengelola konflik internal di Korintus. Disatu sisi Ia menerima fakta sosiologis sebagai suatu proses yang normal. Namun disisi yang lain, Ia mengunci ruang negoisasi itu dengan pemahaman teologi. Sebab bagi-Nya, perbedaan itu wajar selama tidak mengeringkan spiritualitas kekristenan. Lalu apa sumbangsih keadaan di Korintus terhadap problematika di Jemaat GPM Elaar? Secara empiris, konflik internal di Elaar yang terjadi sejak tahun 2006 itu adalah masalah politik identitas yang berkelindan dengan persoalan pelayanan Gereja. Keadaan ini dapat digambarkan seperti benang kusut yang sulit

⁷ Bnd., Ekaputra Tupamahu, “Hibrid(isasi) Gereja di Era Postkolonial: Membaca Konflik di Gereja Korintus Bersama Homi K. Bhaba”, dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah*.

⁸ Bnd. Pfitzner, V.C, “Kasatuan dalam Kepelbagaian”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 51

diurai, karena ada dua identitas yang bermain di sana. Pertama adalah persoalan adat dan kedua adalah persoalan gerejawi.

Gagasan teologi Paulus tentang banyak anggota tetapi satu tubuh tidak dapat dipandang “solusi jadi” untuk penyelesaian konflik internal umat di Elaar yang mengarah pada tarik menarik kepentingan yakni apakah dibiarkan adanya pemekaran jemaat apakah tidak. Meskipun demikian, untuk memaksimalkan fungsi pelayanan gereja dan menumbuhkan spiritualitas umat, maka keinginan terbentuknya sebuah Jemaat mandiri patut diapresiasi, jika ini menjadi jalan tengah terhadap penyelesaian konflik yang sudah terjadi belasan tahun silam. Pemekaran jemaat baru di Elaar (apabila itu dimungkinkan) hendaknya tidak dipahami sebagai usaha untuk memecahkan atau menghilangkan eksistensi persekutuan atau kerekatan keluarga adat yang telah terbangun sejak dahulu kala. Ada dimensi iman dan spiritualitas di atas segalanya.

Secara etimologis pemekaran berarti berkembang, menjadi bertambah luas atau menjadi besar. Sedangkan perpecahan berarti terbelah menjadi dua atau rusak. Merujuk pada pengertian ini, pemekaran jemaat mesti dilihat sebagai strategi pekabaran Injil dan untuk mempercepat pertumbuhan spiritualitas warga jemaat. Dengan adanya kesadaran seperti ini, argumen teologis Paulus tentang satu tubuh banyak anggota dan analoginya tentang menanam dan menyiram merupakan suatu alat negosiasi yang harus diterima sebagai solusi teologi terhadap persoalan keumatan di Jemaat GPM Elaar. Solusi yang berikut ialah, perlu adanya pendidikan perdamaian terutama bagi generasi muda kedua belah pihak. Pendidikan perdamaian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengubah pola dan struktur pemikiran yang dapat mendorong transformasi batin sebagai jalan menciptakan kondisi yang tepat untuk membangun perubahan sosial.⁹ Pendidikan perdamaian harus dapat diimplementasikan dalam bentuk proyek pengajaran di dalam pendidikan formal gereja. Penyelenggaraan pendidikan formal gereja di Jemaat Elaar selama ini absen terhadap hal-hal ini. Padahal ada kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai titik temu dalam proses tersebut.

Kesimpulan

Gereja-gereja di Maluku sepanjang sejarahnya selalu mengalami gejolak sosio-politis. Sebagian dari gejolak yang dihadapi itu berhasil mengantarkan gereja semakin lebih kuat. Namun tidak sedikit yang justru melemahkan peran profetisnya. Tidak dapat dipungkiri lagi,

⁹ Ian M. Harris & Marry Lee Morrison, *Peace Education*, (Jeferson, N,C: McFarland and Company, 2004), 13

kedepan GPM akan semakin terkonsentrasi pada aspek keutuhan umat dan lembaga. Faktor politik dan budaya paling dominan dalam masalah ini. Isu-isu pemekaran jemaat mandiri, entah dalam pertimbangan dan latar belakang apapun, akan selalu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tersebut.

Uraian di atas, memperlihatkan bahwa di satu sisi gereja dapat tampil sebagai penengah konflik, tetapi di sisi yang lain, ia justru berada dalam pusaran konflik itu sendiri yang membuatnya tidak lagi netral. Hal yang paling meyalutkan lagi bahwa langkah yang diambil oleh gereja terhadap konflik internal antar umat di Elaar ialah ketika tatanan adat dan gereja dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adat dan gereja berjalan beriringan untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat. Poinnya ialah, perlu adanya suatu *kerendahan hati* dari semua pihak dalam mengambil langkah-langkah yang strategis untuk masa depan bersama. Bukankah hidup ain ni ain itu indah?

DAFTAR PUSTAKA

- Alberth Akollo, [*Peranan Gereja Ditengah Konflik dua Komunitas Pemuda Batu Gantung Dalam dan Pemuda Batu Gantung Ganemo di Jemaat GPM Rehoboth*](#). Tesis Program studi Sosiologi Agama UKSW, 2015.
- Dean G. Pruitt, dkk, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Elizabeth Marantika, dkk, *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015
- Ian M. Harris & Marry Lee Morrison, *Peace Education*, Jeferson, N,C: McFarland and Company, 2004
- John Chr Ruhlessin, *Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku*. Salatiga: Program Pascasarjana Program Studi Doktor Sosiologi Agama, 2005
- Pfitzner, V.C, *Kasatuan dalam Kepelbagaian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Rudolf Rahabeat & Johan Saimima, Penyunting, *Menuju Gereja Orang Basudara: Refleksi 500 Tahun Protestantisme dari Maluku*. Salatiga: UkSW Press, 2017
- Thompson, M.L, *Keluarga Sebagai Pusat Pembentukan: Sebuah Visi tentang Peranan Keluarga dalam Pembentukan Rohani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia: 2001
- Willi Marxen, *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018